



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN
STAFF KHUSUS WAKIL PRESIDEN/
SEKRETARIS EKSEKUTIF (AD INTERIM)
TIM NASIONAL PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TNP2K)
PADA
LOKAKARYA EVALUASI
PELAKSANAAN PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING 2018 - 2024**

24 NOVEMBER 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati:

- Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Para Pejabat dan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga

- Pera pejabat dan perwakilan daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa
- Perwakilan dari mitra pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, pakar, organisasi profesi dan hadirin yang megikuti acara ini.
- Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT – Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dalam acara Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2018 - 2024.
- Saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta, baik dari pusat maupun daerah. Kedatangan Bapak dan Ibu dalam kondisi pandemic ini merupakan salah satu cerminan dari komitmen kita semua untuk melakukan percepatan pencegahan *stunting*.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

- Pada tahun 2018, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, anak balita Indonesia yang mengalami stunting adalah sebesar 30,8%. Ini artinya hampir 1 dari 3 anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dimulai dari masa kandungan hingga usia 2 tahun

atau 1000 Hari Pertama Kehidupan. Jika dibiarkan, anak-anak yang *stunting* akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktivitas yang rendah. Hal ini, dalam jangka panjang akan merugikan kita sebagai bangsa dan negara.

- Karenanya, Pemerintah bertekad menurunkan prevalensi stunting dengan segera, agar Indonesia mempunyai generasi yang lebih sehat, cerdas dan produktif. Pada tahun 2018 Bapak Wakil Presiden meluncurkan 5 pilar percepatan pencegahan stunting, yaitu (1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pusat dan Daerah; (2) Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku; (3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa; (4) Kebijakan Ketahanan Pangan dan Gizi dan (5) Pemantauan dan Evaluasi.
- Kelima pilar tersebut kemudian dijabarkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting atau Stranas Stunting, yang kini menjadi acuan bersama dalam melaksanakan program percepatan pencegahan stunting.
- Hingga saat ini, secara bertahap program ini telah dilakukan 260 di Kabupaten/Kota prioritas. Dimana dari 258 Kepala Daerah dari wilayah prioritas tersebut telah menandatangani komitmen untuk melakukan percepatan pencegahan stunting

di wilayahnya. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, pencegahan *stunting* dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumberdaya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan *stunting*.

- Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui berbagai mekanisme. Total dana yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang dikelola oleh Kementerian dan Lembaga pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 29 trilyun, sedangkan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 27.5 trilyun.
- Pemerintah Pusat juga memberikan Dana Alokasi Khusus bagi lokasi prioritas, baik itu DAK Fisik maupun DAK Non Fisik. Khusus mengenai DAK Non Fisik, Pemerintah mengalokasikan dana khusus melalui BOK Kesehatan yang dapat digunakan oleh Kabupaten/Kota untuk melaksanakan konvergensi pencegahan *stunting* di wilayahnya. Dana Desa pun menjadi sumber dana pencegahan *stunting*.
- Pendampingan pelaksanaan Program Percepatan Pencegahan *Stunting* kepada Pemerintah Daerah juga sudah dilakukan. Pendampingan ini fokus pada upaya untuk mendorong konvergensi di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Proses dimulai dengan melakukan analisis situasi,

pemetaan program dan kegiatan, penyusunan rencana kerja hingga monitoring dan evaluasinya.

- Di tingkat desa, konvergensi percepatan pencegahan stunting terus didorong. Kemendesa telah menempatkan kegiatan terkait percepatan pencegahan stunting sebagai salah satu prioritas penggunaan Dana Desa. Kemendesa telah merekrut Kader Pembangunan Manusia (KPM), sebagai kader yang membantu Pemerintah Desa melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting di desa. Saat ini sudah lebih dari 95% desa yang mempunyai Kader Pembangunan Manusia (KPM).
- Setelah 3 tahun pelaksanaan program, kemajuan di tingkat outcome sudah dapat dilihat. Survei Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting turun, dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 27,7% pada tahun 2019 atau turun sekitar 3,1%. Jika ditarik lebih jauh dari tahun 2013, maka rata-rata penurunan adalah sebesar 1,6% per tahun.
- Hasil perhitungan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) oleh BPS dengan menggunakan 6 dimensi dan 12 Indikator yang terkait erat dengan stunting, juga menunjukkan bahwa ada kenaikan IKPS sebesar 2,1 dari tahun 2018 sebesar 64,48 menjadi 66,6 pada tahun 2019. Perbaikan yang cukup signifikan adalah pada dimensi gizi dan

perumahan yang meliputi cakupan sanitasi dan air minum.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

- Kemajuan dan capaian selama 3 tahun terakhir ini harus diapresiasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama melakukan upaya percepatan pencegahan stunting dalam 3 tahun terakhir.
- Namun demikian, kita masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan target menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024.
- Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau sumber lain dapat secara terintegrasi sampai di wilayah dan keluarga sasaran. Ini tidak akan mudah dilakukan, karenanya setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerjasama antar pihak.
- Tantangan berikutnya adalah pendataan, pemantauan dan pelaporan. Data terkait stunting harus lebih akurat, bisa diupdate secara cepat, dari desa hingga pusat. Termasuk bagaimana penggunaan dana desa dilaporkan secara cepat

dan akurat, melalui Village Score Card oleh Pemerintah Desa kepada kabupaten/kota, lalu dari kabupaten/kota kepada Pemerintah Pusat.

- Tantangan lain adalah pandemi Covid-19, yang salah satunya berdampak pada turunnya jumlah kunjungan ke Posyandu. Sementara pencegahan stunting tidak bisa berhenti, karenanya diperlukan upaya-upaya yang inovatif dari Pemerintah Daerah untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait hal ini, Pemerintah Pusat telah menyusun beberapa panduan yang bisa menjadi referensi dalam penyediaan layanan di lapangan.

Hadirin yang berbahagia,

- Pertemuan ini adalah satu forum yang baik bagi kita semua untuk bersama-sama mendiskusikan tentang kemajuan, hambatan, dan perbaikan yang harus dilakukan ke depan untuk mencapai target penurunan prevalensi hingga 14% pada 2024. Saya mohon agar Bapak dan Ibu sekalian dapat berpartisipasi secara aktif dalam forum Ini.
- Pada akhirnya, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan program percepatan pencegahan

stunting. Semoga Allah SWT meridhoi semua ikhtiar kita dan tetap memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan ikhtiar ini. Dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahiim, saya nyatakan acara Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Ini dibuka.

- Demikian saya sampaikan, selamat mengikuti acara lokakarya.

***Wassalamu'alaikum
Wabarakatuh***

Warahmatullahi